

**PENYELESSAIAN PELANGGARAN ADAT DI  
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG  
MENURUT HUKUM ADAT BALI**

**TESISI**

**OLEH  
NYOMAN ROY MAHENDRA PUTRA**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

**BAB I**

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia di dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara terikat pada norma-norma yang telah disepakati baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Norma hukum merupakan norma yang memiliki perlengkapan lebih komplit jika dibandingkan dengan norma-norma lainnya, dalam arti norma hukum mempunyai alat penegak apabila normanya dilanggar.

Norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia ada bermacam-macam seperti norma hukum perdata, norma hukum pidana, norma hukum administrasi. Norma hukum yang menjadi pedoman masyarakat untuk bertingkah laku dalam masyarakat ada dalam bentuk tertulis ada juga dalam bentuk tidak tertulis yang disebut hukum adat, di samping hukum agama, hukum kebiasaan.

Hukum adat sebagai norma hukum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi anggota masyarakat di mana hukum adat itu berlaku, sudah barang tentu diharapkan masyarakat ataupun anggota masyarakat akan mentaatinya.

Keberadaan hukum adat di samping hukum negara diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menentukan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

diatur dalam undang-undang.” Demikian pula Pasal 28 I ayat (3) menentukan : “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat diakui eksistensinya atau keberadaannya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2007, hukum adat sebagai suatu kearifan lokal dalam pengembangan hukum nasional diakui dan dihormati. Dalam rangka menata hukum nasional, maka hukum adat mendapat tempat sebagai bahan penyusunan dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004 – 2009, kebijakan dan pembenahan sistim dan politik hukum diarahkan melalui untuk memperbaiki substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum, melalui upaya :

1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan, dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistim hukum dan peraturan melalui pemberdayaan jurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional.
2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penataan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf pengadilan serta kualitas sistim

peradilan yang terbuka dan transparan, menyederhanakan sistim peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran, memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistim hukum dan peraturan melalui pemberdayaan jurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional;

3. meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.<sup>1</sup>

Di dalam masyarakat adat, sering terjadi ketegangan-ketegangan sosial, oleh karena terjadi pelanggaran adat oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat dalam suatu lingkungan adat. Peristiwa ketegangan sosial tersebut akan pulih kembali jika terjadi reaksi masyarakat yang berupa sanksi adat dan telah dilaksanakan atau dipatuhi oleh si pelanggar yang menimbulkan ketegangan tersebut. Pelanggaran adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dari kehidupan persekutuan baik bersifat materiil maupun immaterial, terhadap seseorang atau masyarakat berupa kesatuan adat. Tindakan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.<sup>2</sup>

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana sini mengandung

---

<sup>1</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, Bagian III-9, hal. 5.

<sup>2</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 67.

unsur agama. Hukum adat yang tidak tertulis itu berfungsi sebagai tata tertib yang diikuti dan dipatuhi dan apabila dilanggar akan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat sebab dianggap mengganggu keseimbangan sosial kemasyarakatan. Oleh karena terhadap si pelaku pelanggaran akan diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat adat melalui pengurus adatnya.

Terganggunya keseimbangan sosial masyarakat adat dapat terjadi bukan saja terhadap sesuatu yang berwujud nyata, akan tetapi juga terhadap sesuatu yang tidak berwujud. Hal tersebut terjadi karena masyarakat hukum adat memiliki alam pikiran komunalisme dan religius magis yang kuat. Alam pikiran masyarakat adat yang demikian tersebut, memandang kehidupan ini sebagai sesuatu yang homogen, di mana kedudukan manusia sebagai sentral/ pusat kehidupan.

Manusia sebagai makhluk hidup yang merupakan bagian dari alam semesta (makro kosmos), tidak terpisahkan dari sang pencipta-Nya (Tuhan Yang Maha Esa) dan bersatu dengan lingkungan alam semestanya. Kesemuanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan berada dalam suatu keseimbangan yang senantiasa harus dipelihara. Di mana harus segera dipulihkan jika suatu ketika keseimbangannya dirasakan terganggu.

Pulau Bali sebagai salah satu kepulauan di Indonesia mewarisi kebudayaan yang luhur dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Demikian juga aturan adatnya tetap terpelihara dan berkembang dengan suburnya di kalangan para warga masyarakat di Bali. Kata “adat” yang dalam istilah di Bali dipakai kata-kata “dresta, sima dan cara” terpelihara di kalangan rakyat dan dirasakan sebagai hal yang diperlukan adanya. Ketaatan terhadap adat di Bali dapat terlihat jelas dalam

kehidupan desa, banjar, subak, dan lain-lain bentuk organisasi kemasyarakatan adat. Setiap orang mentaati adat itu dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi adat yang diberikan oleh warga masyarakat itu sendiri. Hal ini membawa tegaknya adat sebagai salah satu alat dalam tegaknya ketertiban hidup bermasyarakat.<sup>3</sup>

Pengertian desa di Bali mengandung dua arti, yaitu desa administrasi dan desa adat (desa pakraman). Desa administrasi mengurus urusan pemerintahan, sedangkan desa adat atau desa pakraman mengurus masalah keagamaan dan dalam bidang adat istiadat. Organisasi kemasyarakatan yang disebut desa adat mempunyai peraturan-peraturan yang mengikat para anggotanya di mana aturan-aturan tersebut merupakan batas-batas wewenang dan kewajiban yang disebut “awig-awig”. Awig-awig ini merupakan aturan pokok yang mengatur pergaulan warganya sehingga tercipta suasana aman, damai dan rukun,. Pelanggaran terhadap awig-awig tersebut, disediakan sanksi yang biasanya berupa “denda”.

Pelanggaran-pelanggaran adat Bali sebagian besar diatur dalam awig-awig desa adat yang bersangkutan yang dapat berupa pelanggaran kesusilaan, pelanggaran terhadap harta benda, pelanggaran terhadap kepentingan pribadi, dan pelanggaran terhadap larangan berupa tidak menjalankan kewajiban atau lalai melaksanakan kewajiban adat.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan adat yang terdapat dalam awig-awig dapat dijatuhi sanksi adat yang merupakan reaksi adat terhadap tidak dilaksanakannya atau atau ditaatinya peraturan-peraturan adat.

---

<sup>3</sup> Tjokorde Raka Dherana, *Pokok-Pokok Organisasi Kemasyarakatan Adat di Bali* (Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana 1975) hal. 3.

Sanksi adat ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sanksi adat selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku maupun keluarganya. Biasanya kejadian atau perbuatan dalam melaksanakan sanksi adat ini “pamarisudhan”, yaitu upacara pembersihan desa dari perasaan kotor alam gaib. Sanksi adat ini bukanlah dimaksudkan sebagai siksaan atau suatu penderitaan, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka kiranya perlu diteliti dan dikaji secara mendalam mengenai “Penyelesaian Pelanggaran Adat Menurut Hukum Adat Bali”, yang hasilnya dilaporkan dalam bentuk tesis.

## B. Perumusan Masalah

Hukum atau norma hukum sebagai pedoman bagi manusia untuk berbuat atau tidak berbuat, mempunyai akibat hukum apabila normanya tidak ditaati atau dilanggar. Tiap-tiap bangsa mempunyai hukumnya sendiri dan sebagaimana halnya dengan bahasa, maka hukum pun hidup dan diciptakan masyarakat, karena hukum merupakan kehidupan dari bangsa itu sendiri. Masyarakat atau golongan menghendaki hukumnya ditaati, akan tetapi tidak semua orang dapat atau mau mematuhi. Supaya hukum ditaati maka masyarakat atau golongan itu mengadakan suatu sarana yang berfungsi sebagai penguat, yaitu yang disebut dengan sanksi yang dapat berupa sanksi formal yang datang dari negara dan sanksi informal yang datang dari masyarakat adat.

Seperti telah dikemukakan di muka, bahwa pedoman bagi masyarakat adat di Propinsi Bali dalam bertingkah laku adalah “awig-awig” yang apabila dilanggar terjadi

---

<sup>4</sup> I. Made Widnyana, *Delik Adat Dalam Pembangunan*, Orasi Pengukuhan Guru Besar (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1992) hal 11.

pelanggaran adat dan diberikan sanksi terhadap pelanggarnya. Adapun permasalahannya dirumuskan sebagai berikut :

1. Jenis-jenis perbuatan apa yang dapat digolongkan ke dalam pelanggaran adat menurut hukum adat Bali?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian pelanggaran adat di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng menurut hukum adat Bali?

#### C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan permasalahan yang diketengahkan di atas, maka tujuan penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan jenis-jenis perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam pelanggaran adat menurut hukum adat Bali.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian pelanggaran adat di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng menurut hukum adat Bali.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai “Penyelesaian Pelanggaran Adat di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Menurut Hukum Adat Bali” ini, hasilnya diharapkan dapat memberi manfaat dari 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini dapat menambah kasanah ilmu hukum khususnya ilmu hukum adat dan sekaligus juga dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Manfaat praktis.



Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum dalam penyelesaian pelanggaran hukum tidak saja semata-mata melalui lembaga pengadilan, tetapi juga terdapat cara penyelesaian di luar pengadilan.

#### E. Kerangka Pemikiran

Desa di Provinsi Bali dibedakan antara desa Administratif dan desa adat ( sekarang di sebut desa Pakramanan ). Desa merupakan organisasi kehidupan yang terendah di dalam suatu negara. Menurut Satjipto Raharjo, untuk adanya tata hukum itu dibutuhkan tiga komponen kegiatan, yaitu (1) pembuatan norma-norma hukum, (2) pelaksanaan dari norma-norma hukum tersebut, dan (3) penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum tersebut.<sup>5</sup> . Sebelum suatu tata hukum itu dapat dijemakan, terlebih dahulu dibutuhkan adanya suatu kehidupan bersama yang terorganisasi. kehidupan yang terorganisasi dalam Negara Indonesia dapat berupa Negara sebagai kehidupan bersama yang terorganisasi yang paling tinggi dan desa yang merupakan kehidupan yang terendah dalam susunan kenegaraan.

Dengan demikian, suatu organisasi yang namanya Negara terdiri dari kehidupan suatu kehidupan bersama dari yang tertinggi berupa wilayah Negara , provinsi , kabupaten/kota ,kota sampai ke tingkat yang paling rendah adalah desa.negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945 terbagi dalam beberapa provinsi dimana salah satu dari provinsi tersebut adalah provinsi Bali.

Di provinsi Bali dikenal dua jenis desa yakni desa administratif dan desa adat (pakraman).desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sabagai kesaatuan masyarakat hukum termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahan terendah dibawah camat dan berhak menyelenggarakan

rumah tangganya sendiri ,dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia .desa adat (desa pakraman )sebagai desa dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun <sup>5</sup>temurun dalam ikatan kahyangan tiga (kahyangan desa ) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo,Hukum dan Perubahan Sosial ,(Bandung : Alumni ,1983),hal 107.

Desa adat atau (desa pakraman) di Bali mempunyai kedudukan ,fungsi dan peranan sebagaimana ditentukan dalam perda provinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986 , tentang “Kedudukan , fungsi dan peranan desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat daerah provinsi tingkat I Bali “.

Pasal 5 Perda nomor 06 tahun 1986 , menentukan :

“desa Adat di provinsi Daerah tingkat I Bali , merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan “ Pasal 6 Perda Nomor 06 Tahun 1986 menentukan :

Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai fungsi :

Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa/Pemerintahan Kelurahan dalam kelancaran dan pelayanan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.

Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam desa Adatnya.

Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan keagamaan.

Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Bali pada khususnya berdasarkan poros-poros salunglung sebayantaka/musyawarah untuk mufakat

Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan desa adat.

- 1) Fungsi tersebut ayat (1) dijabarkan di dalam awig awig Desa Adat .dengan demikian.desa adat (desa Pekraman) yang bersangkutan sampai berbentuk

rancangan .Rancangan awig awig tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan barulah Awig awig desa adat tersebut disahkan oleh Krama Desa Adat<sup>6</sup>Awig awig Desa Adat yang telah disahkan oleh Krama Adat (warga desa adat )harus dicatatkan di kantor Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Kehidupan bersama yang terorganisasi yang berbentuk Negara maupun Desa Adat (Desa Pekraman) memerlukan hukum yang mengatur kehidupan bersama dalam wadah Negara dan Desa Adat tersebut ,sehingga tercipta ketertiban dalam hidup bersama itu .ini berarti baik Negara maupun desa adat akan menciptakan hukum,dimana pada hukum itu dibebankan fungsi –fungsi tertentu seperti menciptakan perdamaian ,menyelesaikan sengketa dan mewujudkan ketertiban .

Hukum atau norma hukum sebagai pedoman bagi manusia untuk berbuat atau tidak berbuat ,mempunyai akibat hukum apabila normanya tidak ditaati atau dilanggar .Tiap tiap bangsa mempunyai hukum sendiri,dan sebagaimana halnya dengan bahasa ,maka hukum pun hidup dan diciptakan masyarakat karena hukum merupakan kehidupan dari bangsa itu sendiri.

Masyarakat atau golongan menghendaki hukumnya ditaati ,akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau mematuhi.supaya hukumnya ditaati maka masyarakat atau golongan itu mengadakan sarana yang berfungsi sebagai penguat yaitu yang disebut dengan sanksi yang dapat berupa sanksi formal yang datang dari Negara dan sanksi informal yang datang dari masyarakat.

Seperti telah dikemukakan di muka bahwa desa di Bali dibedakan menjadi desa administrative dan desa pekraman ,dimana desa pekraman mempunyai awig awig sendiri

---

<sup>5</sup>Periksa Perda Provinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986.

<sup>6</sup>Periksa penyelesaian Perda Provinsi Bali,Nomor 06 Tahun 1986

.di dalam awig awig itu terdapat ketentuan ketentuan atau pedoman bagi para warga desa pekraman itu untuk bertingkah laku .di dalam awig awig itu juga tercantum ketentuan ketentuan mengenai reaksi adat atau sanksi adat atau sanksi adat yang dapat dijatuhkan terhadap warga yang melanggar awig awig desa pekraman .adanya awig awig desa ini kiranya sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich”...*social associations have an “inner order “ which is true determinant of action”*”<sup>7</sup>.

Bagi orang yang melanggar hukum,hukuman dijatuhkan oleh desa .baik oleh kepala desa sendiri atas nama desa ,baik oleh para juru (alat perlengkapan )desa secara bersama sama ,maupun oleh rapat warga desa seluruhnya akan dirasa sangat besar ,dan yang bersangkutan akan dicap sebagai orang yang melanggar ketertiban umum.Pengadilan desa ini oleh orang Belanda disebut sebagai pengaadilan ketertiban (*discipolinaire rehtspraak*)”<sup>8</sup>

Dengan demikian ,masyarakat adat yang di Bali disebut warga desa pekraman memiliki aturan aturan sendiri yang menentukan bagaimana dalam melakukan tindakan yang telah disepakati bersama

#### F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksud untuk melakukan pengkajian terhadap hukum adat dalam penyelesaian pelanggaran hukum adat khususnya pada masyarakat desa pakramandi Bali. Penelitian akan difokuskan pada tataran noma-norma hukum adat yang tertuang dalam awig-awig desa pakraman serta putusan-putusan masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran adat di Bali.

---

<sup>7</sup> J.W .Harris BCL , Legal Philosophies , (London : Butterwooths , 1980 ,hal . 241.

<sup>8</sup> Sutardjo Kartohadikusumo , Desa (Bandung : Sumur Bandung , 1965 ) hal .262.

### Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu hanya bersifat menggambarkan dan menganalisis tata cara penyelesaian pelanggaran adat menurut hukum adat Bali.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama, sedangkan data sekunder merupakan data penunjang. Hal ini dimungkinkan mengingat pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis empiris, yang menggunakan data primer sebagai bahan kajian.

### Sampel Penelitian.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah “ pimpinan adat “ atau “ prajuru desa pakraman “ yang menangani perkara pelanggaran adat serta masyarakat yang pernah melakukan pelanggaran adat serta masyarakat yang pernah melakukan pelanggaran adat di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.

### Responden Penelitian

Karena sifat data homogen, maka responden dalam penelitian ini adalah “ prajuru desa pakraman “ Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng serta seorang yang pernah melakukan pelanggaran adat.

### Metode Pengumpulan Data

Data utama dalam penelitian ini adalah data primer sedangkan data sekunder sebagai penunjang. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara untuk memperoleh data primer, sedangkan data sekunder sebagai penunjang dipergunakan metode kepustakaan dan studi dokumentasi yang berupa bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum adat serta awig-awig desa pakraman Sepang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### Metode Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder, maka akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yang hasilnya dalam bentuk uraian atau narasi.

#### G. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari empat Bab. Dimana masing-masing Bab akan terdiri dari beberapa sub Bab.

BAB I tentang pendahuluan, terdiri dari tujuh Sub Bab, ialah Sub Bab A tentang Latar Belakang, Sub Bab B tentang Perumusan Masalah, Sub Bab C tentang Tujuan Penelitian, Sub Bab D tentang Manfaat Penelitian, Sub Bab E tentang Kerangka Pemikiran, Sub Bab F tentang Metode Penelitian dan Sub Bab G tentang Sistematika Penulisan.

BAB II tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari tiga sub Bab ialah Sub Bab A tentang Pengertian Hukum Adat dan Pelanggaran Adat, Sub Bab B tentang system Kekeluargaan menurut hukum Adat, Sub Bab C tentang Hukum Pelanggaran Adat dan Lembaga Adat yang mendukungnya.

BAB III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari dua Sub Bab ialah Sub Bab A tentang jenis-jenis Perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam Pelanggaran Adat menurut Hukum Adat Bali dan Sub Bab B tentang pelaksanaan

Penyelesaian Pelanggaran Adat di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng menurut Hukum Adat Bali.

BAB IV Penutup yang terdiri dari dua Sub Bab ialah Sub Bab A tentang Kesimpulan dan Sub Bab B tentang Saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Hukum Adat dan Pelanggaran Adat**



Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsure agama. Hukum sebagai salah satu permasalahan yang dihadapi manusia merupakan suatu permasalahan yang senantiasa dihadapi oleh umat manusia dan dalam waktu kapanpun juga. Dengan perkataan lain hukum sebagai suatu permasalahan yang paling dalam bagi setiap manusia yang berperadapan dimanapun manusia itu berada. Hukum termasuk juga hukum adat dalam proses kehidupan manusia menempatkan diri dalam berbagai bentuk peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis.

Berbicara mengenai hukum adat maupun pelanggaran adat, tidak bias lepas dari pembicaraan aspek kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena hukum dan juga hukum adat merupakan perwujudan dari kebudayaan bangsa Indonesia. Pada hakikatnya kebudayaan itu mempunyai tipe perwujudan, yaitu pertama wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.. Keduanya, kebudayaan dapat mewujudkan diri sebagai kompleks aktivitas kelakuan dari manusia dalam masyarakat. Dan ketiganya, kebudayaan dapat berwujud sebagai benda-benda hasil karya manusia<sup>1</sup>.

Wujud yang pertama terdapat dalam alam idealia dari warga masyarakat

---

1) Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan (Jakarta: PT. Gramedia, 1974), hal 15

kebudayaan itu yang dapat kita sebut adat atau kelakuan, yang bermaksud menunjukkan bahwa kebudayaan idiil itu biasanya juga berfungsi sebagai tata

kelakuan yang mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat<sup>2</sup>.

Sistem nilai-nilai budaya bangsa dengan demikian terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat yang merupakan warga dari kebudayaan yang bersangkutan, yaitu mengenal hal-hal yang harus mereka anggap penting dan bernilai dalam hidup. Karena itu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman untuk berbuat. Yang penting yaitu sebagai suatu sistem yang mengontrol atas perbuatan-perbuatan manusia dalam masyarakat. Di dalam mengontrol ini masyarakat tersebut mempunyai suatu pula untuk mengukur apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, diperbolehkan atau tidak oleh masyarakat di mana pelaku perbuatan tadi hidup dan menjadi anggota<sup>3</sup>.

Hukum atau norma hukum sebagai pedoman bagi manusia untuk berbuat atau tidak berbuat, mempunyai akibat hukum apabila normanya tidak ditaati atau dilanggar. Tiap-tiap bangsa mempunyai hukumnya sendiri, dan sebagaimana halnya dengan bahasa, maka hukum pun hidup dan diciptakan masyarakat, karena hukum merupakan kehidupan dari bangsa itu sendiri<sup>4</sup>.

---

2) Loc. Cit

3) Hermin Hadiati Koeswadi, "Aspek Budaya Dalam Pemidanaan Delik Adat"  
Makalah dalam Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap hukum Pidana  
(Denpasar: Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana,  
1975) hal 4.

4) Ibid, hal 6

elanggaran

imbangan

in materiil

orang-seorang atau orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (gerombolan). Tindakan sedemikian itu menimbulkan sesuatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh adat ("adat reactive"), karena reaksi mana

keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang<sup>5</sup>).

Dengan demikian, untuk dapat disebut pelanggaran adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.

Van Vollenhoven, mengartikan delik adat itu sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan<sup>6</sup>. Soepomo mengatakan bahwa juga di dalam hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan “illegal” dan hukum adat mengenal pula ichthar-ichthar untuk memperbaiki hukum jika hukum diperkosa<sup>7</sup>).

Apabila diikuti pendapat-pendapat para sarjan tersebut diatas, kira-kira dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya suatu pelanggaran adat itu merupakan tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Guna memulihkan kembali ketentraman dan

5) Teer Haar BZN, Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976) hal.

225.

6) Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Bandung: Alumni, 1979) hal. 226.

7) Sepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal.

diganggu dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat, demikian kata-kata Lesquillieier<sup>8</sup>).

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (“living law”) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dpt dihapus dengan perundang-

undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga, malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan<sup>9)</sup>.

Soerjono Soekanto, menggunakan istilah hukum penyelewengan, dan mengemukakan bahwa hukum penyelewengan adat itu akan mencakup penyelewengan di bidang Tantra Adat, Hukum Perdata Adat, dan Hukum Pidana Adat. Sebenarnya pemakaian istilah hukum pidana disini dirasakan kurang tepat, oleh karena yang dimaksud di sini adalah penyelewengan dari ketentuan-ketentuan adat, yaitu sikap tindak yang mengganggu kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku Hukum Tantra Adat, Hukum Perdata Adat<sup>10)</sup>.

Dengan demikian, di dalam pembahasan mengenai hukum penyelewengan adat bidang-bidangnya akan mencakup:

**a. ~~Penyelewengan dalam bidang~~ hukum Tantra Adat:**

8) Soerojo Wignjodipuro, Op. Cit, hal 287.

9) Hilman Hadikusumo, Hukum Pidana Adat, (Jakarta : CV. Wadjawali, 1981) hal. 307.

10) Soerjono Sukanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta : CV. Radjawali, 1981), hal. 307.

tindak yang jahat<sup>11)</sup>.

Upaya dari masyarakat adat yang mengutamakan terciptanya keseimbangan (“harmonis”) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia dan perorangan, antara persekutuan (kelompok) dan masyarakat luas, merupakan dasar pikiran tradisional bangsa Indonesia. Menurut Soepomo, segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan penegak hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum<sup>12)</sup>.

Keberadaan sanksi adat sebagai sarana stabilisator yang berfungsi dan berperan sebagai pengendali keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Jika terjadi perbuatan yang melanggar norma-norma adat, maka pelaku diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi pelanggaran tersebut, seperti melakukan upacara bersih desa yang bertujuan mengembalikan keseimbangan dari kekuatan magis yang dirasakan telah terganggu.

Dengan demikian, menurut konsepsi hukum adat, peneakan sanksi adat oleh pemuka adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, yang berfungsi untuk mendatangkan rasa damai antar sesama warga masyarakat adat atau anggota masyarakat adat dengan masyarakat lainnya.

11) Loc. Cit.

.....ka adat pada dasarnya menjadi kewajiban adat yang wajib dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan untuk menghilangkan noda setelah timbul kegoncangan yang disebabkan adanya pelanggaran adat. Cara mengembalikan keseimbangan yang terganggu tersebut adalah melaksanakan upacara atau ritual adat menurut adat istiadat setempat dan dilaksanakan dengan disaksikan oleh para pemuka adat atau perangkat adat serta tokoh-tokoh masyarakat adat setempat.

## B. Sistem Kekeluargaan Menurut Hukum Adat

Masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan keturunan (“genealogis”) pada dasarnya masyarakat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama. Dengan kata lain : seseorang mmenjadi anggota masyarakat hukum adat

yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari ayah-asal (nenek moyang laki-laki) tunggal-melalui garis keturunan perempuan, dan dengan demikian, menjadikan semua anggota masyarakat yang bersangkutan itu suatu kesatuan dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum (adat) yang sama<sup>13)</sup>.

Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan oleh faktor “genealogis” ini, kita mengenal tiga macam (type) pertalian keturunan, yaitu :

1. Pertalian keturunan menurut garis laki-laki – hal ini terdapat dalam masyarakat

13) Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (Suatu Pengantar), (Jakarta : Pradnya Paramita, Cet. Ke 5, 1984) hal. 32.

2. Pertalian keturunan menurut garis perempuan – hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Minangkabau, Orang kerinci, orang Semendo,.

3. Pertalian keturunan garis ibu dan bapak – hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Bugis, orang Dayak, di Kalimantan, orang Jawa<sup>14)</sup>.

Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis laki-laki – masyarakat hukum adat kebapakan (“patrilineal, masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian menurut garis perempuan – masyarakat hukum adat keibuan (“matrilineal”) dan masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis ibu dan bapak – masyarakat hukum adat keibu-bapakan (“parental”) – adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis keturuna melalui ayah dan ibu dan kedua garis itu dinilai ayah – maupun pihak ibu – family ibu – dirasai dan nilai sama oleh yang bersangkutan dan dipandang sama oleh masyarakat, sebagai suatu pertalian kekeluargaan<sup>15)</sup>.

Berdasarkan susunan dan luasnya susunan itu, maka masyarakat hukum adat keibu-bapaan dapat dibagi menjadi dua jenis :

- a. Masyarakat hukum adat keibu-bapaan yang dalam bahasa Belanda disebut “gezin” – keluarga dalam arti kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak --, yaitu kesatuan yang terkecil – Jawa dan Madura.

---

14) Ibid, hal. 33  
15) Ibid, hal. 34  
merupakan kesatuan yang menjadi gabungan dari sejumlah gezin-gezin—  
Kalimantan<sup>16)</sup>.

### C. Hukum Pelanggaran Adat dan Lembaga Adat yang Mendukungnya.

Pulau Bali merupakan salah satu kepulauan di Indonesia mewarisi kebudayaan yang luhur dan diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Demikian juga aturan adatnya tetap terpelihara dan berkembang dengan suburnya dikalangan para warga Bali. Kata “adat” yang dalam istilah Bali dipakai kata-kata “dresta”, “sima”, dan “cara” terpelihara di kalangan rakyat dan dirasakan sebagai hal yang diperlukan adanya. Ketaatan terhadap adat di Bali dapat terlihat jelas dalam kehidupan desa banjar, subak, dan lain-lain bentuk organisasi kemasyarakatan adat. Setiap orang menaati adat itu dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi adat yang diberikan oleh warga masyarakat adat itu sendiri. Menurut Tjokorda Raka Dherana, hal ini membawa tegaknya adat sebagai salah satu alat dalam tegaknya ketertiban hidup bermasyarakat<sup>17)</sup>.

Bali dikenal mempunyai adat yang kuat karena dirasakan oleh setiap mereka yang berada di Bali akan peranan adat dalam kehidupannya. Kehidupan adat dipelihara dalam wadah organisasi kemasyarakatan adat yang berupa Desa, Banjar,

Sekehe, dan Subak. Perbedaan bentuk-bentuk tersebut didasari atas perbedaan kepentingan yang mendasari pembentukan organisasi kemasyarakatan adat itu. Seperti halnya dengan kepentingan untuk menempati daerah tertentu menyebabkan mengelompoknya orang-orang di dalam desa, dan bersamaan dengan menempati daerah tertentu, maka mereka mendirikan yang disebut “kahyangan tiga”, yaitu Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem<sup>18)</sup>. Kahyangan adalah bangunan berupa pura tempat umat Hindu di Bali melakukan persembahyangan guna mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa.

Kehidupan di desa didasari pula atas suatu keseimbangan magis dengan menempatkan pura di Desa di tengah-tengah desa. Pura Puseh terletak di ulu desa, dan pura dalem dengan setranya (kuburan) terletak di tebebn desa. Dalam hubungannya dengan agama Hindu di Bali. masing-masing pura tersebut di puja dan dipercaya sebagai tempat Tuhan Yang Maha Esa dalam aspek-aspeknya sebagai Brahma, Wisnu dan Siwa. Brahma sebagai Maha Pencipta bertempat di Pura Desa, yaitu di tengah-tengah desa, Wisnu sebagai Maha Pelindung terletak di Pura Puseh, yaitu di Ulu Desa, dan Siwa sebagai pemralina (kekuatan yang mengembalikan ke asal mulanya) terletak di Pura Dalem, yaitu terletak di Teben Desa. Dalam kepercayaan masyarakat di Bali, pengertian ulu di tujukan pada arah timur ataupun utara, sedangkan istilah teben ditujukan pada arah barat atau selatan<sup>19)</sup>.

Setiap organisasi kemsyarakatan adat di Bali mempunyai peraturan-peraturan yang mengikat para anggotanya di mana aturan tersebut merupakan batas-batas wewenang dan kewajiban yang disebutnya “awig-awig” atau “sima”, atau “perarem”, dan “lokacara”. Awig-awig ini merupakan aturan pokok yang mengatur

---

18) Ibid, hal. 5.

19) Loc. Cit.



segala aspek pergaulan para warganya, sehingga tercipta suasana aman, damai dan rukun. Pelanggaran terhadap awig-awig tersebut, biasanya dikenakan sanksi atau reaksi adat berupa denda.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 tahun 1986, di Daerah Tingkat I bali terdapat desa dan desa adat. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desa adat sebagai desa dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang memppunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat. Umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga (kahyangan desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Awig-awig desa adat secara tegas dimuat dalam Bab IV Perda Nomor 06 Tahun 1986, yang menentukan :

– Pasal 7<sup>V</sup>

1. Setiap desa adat agar memiliki awig-awig tertulis.
2. Awig-awig desa adat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

– Pasal 8<sup>F</sup>

---

V : Perda Nomor 06 tahun 1986, Menentukan :

1. Awig-awig desa dibuat dan disahkan oleh krama desa adat.
2. Awig-awig desa adat dicatatkan di Kantor Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

– Pasal 9<sup>F</sup>

Sanksi yang di atur dalam awig-awig desa adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dengan demikian, setiap Adat di Bali diharapkan memiliki awig-awig desa adat. Awig-awig desa adat ini digarap oleh desa adat yang bersangkutan sampai berbentuk rancangan. Rancangan awig-awig ini kemudian disampaikan kepada Bupati / Walikota daerah yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuannya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan, barulah awig-awig desa adat tersebut disahkan oleh krama desa adat.

Dalam rangka menegakkan awig-awig desa adat ini, disediakan suatu lembaga yang disebut Prajuru Desa Adat.

– Pasal 10 Perda Nomor 06 Tahun 1986, menentukan:

1. Desa adat dipimpin oleh perajuru desa adat.
2. Prajuru desa adat dipilih dan ditetapkan oleh masing-masing krama desa adat.
3. Struktur dan susunan prajuru desa adat diatur dalam awig-awig desa adat.

Penjelasan pasal 10 Perda Nomor 06 Tahun 1986, menerangkan bahwa :

De <sup>F</sup> : Perda Nomor 06 tahun 1986, Menentukan : a sekaligus merupakan suatu organisasi pemerintahan yang tidak langsung di bawah Camat. Desa adat berfungsi dan berperan mengatur kehidupan masyarakat desa yang dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang dinamakan desa adat. Unsur-unsur prajuru desa adat ialah :

- a. Bendesa adat, sebagai pimpinan prajuru desa adat dipilih / diangkat dari krama desa adat.
- b. Petajuh adalah wakil bendesa adat.
- c. Penyarikan adalah juru tulis bendesa adat.
- d. Kestinoman adalah juru arah.
- e. Pemangku adalah yang membidangi urusan upacara agama di pura.
- f. Pesedahan / Petengan adalah bendahara.

Adapun tugas dari prajuru Desa Adat ditentukan dalam pasal 11 Perda Nomor 06 Tahun 1986, sebagai berikut:

- a. Bendesa adat, sebagai pimpinan prajuru desa adat dipilih / diangkat dari krama desa adat.
- b. Petajuh adalah wakil bendesa adat.
- c. Penyarikan adalah juru tulis bendesa adat.
- d. Kestinoman adalah juru arah.
- e. Pemangku adalah yang membidangi urusan upacara agama di pura.
- f. Pesedahan/Petengan adalah bendahara.

Adapun tugas dari Prajuru Desa Adat ditentukan dalam pasal 11 Perda Nomor 06 Tahun 1986, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan awig-awig desa adat.
- b. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan bagi desa adat sesuai dengan sastra agama.

- c. Mengusahakan perdamaian dan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa adat.
- d. Mengembangkan kebudayaan daerah dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional.
- e. Membina dan mengkoordinasi masyarakat hukum adat mulai dari keluarga berdasarkan adat istiadat yang berlaku pada setiap desa adat, guna meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong-royongan.
- f. Mewakili desa adat dan bertindak atas nama dan untuk desa adat atau masyarakat hukum adat dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- g. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat yang berkaitan dengan harta benda pusaka desa adat.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tentang kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali mempunyai arti yang sangat penting karena peraturan daerah ini memberikan landasan yuridis formal pada eksistensi desa adat di Bali. Namun, dengan berkembangnya masyarakat dan terjadinya perubahan sosial yang demikian cepat serta dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan desa, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi di Bali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan asas desentralisasi diarahkan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman

daerah yang menghormati kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa.\*\*)

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang desa Pakraman sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2003 mengatur tentang Desa Pakraman serta Banjar Pakraman sedangkan warganya disebut krama desa atau krama banjar.

Desa pakraman menurut pasal 1 angka 4 Perda Nomor 3 Tahun 2001 Jo. Perda Nomor 3 Tahun 2003 adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus

---

\*\*) Periksa Penjelasan Umum Perda Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman. Pasal 1 angka 5 adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari desa pakraman. Sedangkan Krama Desa / Krama Banjar, menurut Pasal 1 angka 6 adalah mereka yang menempati karang desa pakraman / karang banjar pakraman dan/atau bertempat tinggal di wilayah desa/banjar pakraman atau di tempat lain yang menjadi warga desa pakraman /banjar pakraman.

Tugas dan wewenang desa pakraman diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perda Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Jo. Nomor 3 Tahun 2003.

– Pasal 5 Perda Nomor 3 Tahun 2001 Jo. Perda Nomor 3 Tahun 2003, Menentukan desa pakraman mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membuat awig-awig;
  - b. Mengatur krama desa;
  - c. Mengatur pengelolaan harta kekayaan desa;
  - d. Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.
  - e. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan “poros-poros”, “sagilik-saguluk”, “salunglung-sabayantaka” (musyawarah-mufkat);
  - f. Mengayomo krama desa.
- Pasal 6 Perda Nomor 3 Tahun 2001 Jo. Perda Nomor 3 Tahun 2003, menentukan desa pakraman mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat;
  - b. Turut serta menentukan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana;
  - c. Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman.
- Desa Pakraman ini dipimpin oleh “Prajuru Desa Pakraman”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- Pasal 7 Perda No. 3 Tahun 2001 Jo. Perda No. 3 Tahun 2003, menentukan:
- 1. Desa pakraman dipimpin oleh prajuru desa pakraman.

2. Prajuru desa pakraman dipilih dan atau ditetapkan oleh krama desa pakraman menurut aturan yang ditetapkan dalam awig-awig desa pakraman masing-masing.
  3. Struktur dan susunan prajuru desa pakraman di atur dalam awig-awig desa pakraman.
- Pasal 8 Perda No. 3 Tahun 2001 Jo. Perda No. 3 tahun 2003, menentukan: Prajuru desa pakraman mempunyai tugas-tugas :
- a. Melaksanakan awig-awig desa pakraman;
  - b. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di desa pakraman, sesuai dengan sastra agama dan tradisi masing-masing;
  - c. Mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat;
  - d. Mewakili desa pakraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan paruman desa;
  - e. Mengurus dan mengatur harta kekayaan desa pakraman;
  - f. Membina kerukunan umat beragama dalam wilayah desa pakraman.

Desa pakraman sesuai dengan Pasal 5 huruf a Perda No. 3 Tahun 2001 Jo. Perda No. 3 Tahun 2003, mempunyai tugas untuk membuat awig-awig desa pakraman yang nantinya ditegakkan/dilaksanakan oleh prajuru desa Pakraman. Awig-awig menurut pasal 1 angka 11 Perda No. 3 Tahun 2001 Jo. Perda No. 3 tahun 2003 adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa pakraman/banjar pakraman

masing-masing. Awig-awig dibuat dan ditetapkan oleh krama desa berdasarkan kesepakatan bersama dan ditaati oleh krama desa itu sendiri dan yang paling terpenting dari awig-awig ini merupakan pengikat persatuan dan kesatuan desa guna menjamin kekompakan dan keutuhan dalam menyatukan tujuan bersama, mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib dan sejahtera demi kedamaian desa.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa Desa Pakraman dengan Prajuru Desa Pakraman merupakan lembaga-lembaga pendukung pelaksanaan hukum adat dan pelanggaran hukum adat yang tertuang dalam “awig-awig Desa Pakraman” Prajuru desa pakraman ini bertindak dan berfungsi sebagai “Hakim Perdamaian Desa” di desa pakraman masing-masing.

Perda propinsi Bali nomor 3 Tahun 2001 Jo. Perda No. 3 Tahun 2003, memberikan perhatian yang luar biasa dalam rangka pemberdayaan dan pelestarian Desa Pakraman, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 13.

- Pasal 13 Perda No. 3 Tahun 2001 Jo. Perda No. 3 Tahun 2003, menentukan :
  - (1) Pemberdayaan dan pelestarian desa pakraman diarahkan kepada hal-hal berikut ;
    - a. pembangunan krama sesuai dengan budaya Bali ;
    - b. terwujudnya pelestarian kebudayaan di desa pakraman ;
    - c. terciptanya kebudayaan daerah Bali di desa yang mampu menyaring secara selektif nilai-nilai budaya asing ;
    - d. terciptanya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi desa pakraman dalam upaya :



- 1) Meningkatkan harkat dan martabat serta jati diri ;
  - 2) Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian desa pakraman sebagaimana dimaksud ( 1 ) , harus mendorong terciptanya :
- a. Sikap demokratis , adil dan obyektif di kalangan prajuru dan krama dasa pakraman masing-masing ;
  - b. Pelestarian adat dan budaya Bali dengan tidak menutup pengaruh nilai-nilai budaya lain yang positif .

Perda No 3. Tahun 2001 Jo. Perda No. 3 tahun 2003, disamping mengatur mengenai prajuru Desa Pakraman, juga mengatur tentang majelis Desa Pakraman dan Pecalang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17.

- Pasal 14 Perda no. 3 Tahun Tahun 2001 Jo. Perda No. 3 Tahun 2003, menentukan :

Majelis Desa pakraman terdiri dari :

- a. Majelis utama untuk propinsi berkedudukan di ibukota propinsi ;
  - b. Majelis Madya untuk kabupaten/kota berkedudukan di kabupaten/kota;
  - c. Majelis desa untuk kecamatan berkedudukan di kota kecamatan.
- Pasal 15 Perda No. 3 Tahun 2001 Jo. Perda No. 3 Tahun 2003, menentukan :
    - (1) Pembentukan majelis desa pakraman di kecamatan dipilih oleh utusan prajuru desa pakraman se-kecamatan melalui paruman alit.

- (2) Pembentukan majelis madya desa pakraman dipilih oleh utusan desa pakraman se-kabupaten/kota melalui paruman madya.
- (3) Pembentukan majelis utama Desa pakraman dipilih oleh utusan desa pakraman se-Bali melalui paruman agung.
- (4) Pengurus majelis utama desa pakraman, majelis madya desa pakraman, dan majelis desa pakraman dipilih dari peserta paruman masing-masing.
- (5) Peserta paruman adalah sebagai berikut :
  - a. Paruman agung dihadiri oleh utusan majelis madya desa pakraman;
  - b. Paruman madya dihadiri oleh utusan majelis desa pakraman;
  - c. Paruman alit dihadiri oleh 2 (dua) orang utusan dari masing-masing desa pakraman.
- (6) Paruman-paruman dipimpin oleh beberapa orang pimpinan sementara yang dipilih dari peserta paruman sebelum terbentuknya pengurus majelis.
  - Pasal 16 Perda No. 3 Tahun 2001 Jo. Perda No. 3 Tahun 2003 menentukan :
    - (1) Majelis desa pakraman mempunyai tugas :
      - a. mengayomi adat istiadat;
      - b. memberikan saran, usul dan pendapat kepada berbagai pihak baik perorangan, kelompok/ lembaga termasuk pemerintah tentang masalah-masalah adat;
      - c. melaksanakan setiap keputusan-keputusan paruman dengan aturan-aturan yang ditetapkan;
      - d. membantu penyuratan awig-awig;

e. melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.

(2) Majelis desa pakraman mempunyai wewenang :

a. memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa pakraman;

b. sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa;

c. membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, di kabupaten/kota, dan di propinsi.

Dari urutan tersebut dapat disimpulkan bahwa majelis desa pakraman mempunyai wewenang sebagai mediator apabila terjadi sengketa antara desa pakraman yang satu dengan desa pakraman yang lain, sedangkan prajuru desa pakraman mempunyai wewenang menyelesaikan/mendamaikan sengketa antara para warga desa pakraman masing-masing.

- Pasal 17 Perda No. 3 Tahun 2001 Jo. Perda No. 3 Tahun 2003, menentukan :

(1) Keamanan dan Ketertiban wilayah desa pakraman dilaksanakan oleh pacalang.

(2) Pacalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah desa pakraman dalam hubungan pelaksanaan tugas adat dan agama.

(3) Pacalang diangkat dan diberhentikan oleh desa pakraman berdasarkan paruman desa.

Pacalang mempunyai tugas di bidang keamanan dan ketertiban dalam hubungannya dengan upacara adat dan keagamaan, sehingga pelaksanaan upacara adat serta upacara keagamaan menjadi tertib dan lancar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari pembahasan yang telah dilakukan baik pembahasan dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan serta dokumentasi dapat dikemukakan bahwa Propinsi Bali yang merupakan salah satu dari propinsi yang menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki kekhususan dalam hal organisasi kemasyarakatan yang disebut desa. Desa di Propinsi Bali dibedakan antara desa administratif yang mengurus bidang pemerintahan dan Desa Adat atau Desa Pakraman yang berhubungan dengan permasalahan upacara adat (adat istiadat) serta masalah keagamaan khususnya agama Hindu yang dianut oleh sebagian besar penduduk Propinsi Bali.

Desa Adat atau Desa Pakraman di Propinsi Bali merupakan desa yang otonom, yang mempunyai system pemerintahan yang dilaksanakan oleh Prajuru Desa Adat atau Prajuru Desa Pakraman serta mempunyai aturan sendiri yang dituangkan dalam bentuk tertulis berupa “Awig-Awig”. Dalam Awig-Awig ini dapat diketahui pedoman bagi para warga desa adat atau desa pakraman dalam bertindak sehari-hari. Desa Adat atau Desa Pakraman terdiri dari beberapa wilayah yang disebut banjar Adat. Keberadaan desa adat atau desa pakraman diayomi, dilestarikan, dan diperdayakan oleh Pemerintah Propinsi Bali, dengan dasar pertimbangan bahwa desa adat atau desa pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di Bali sangat peranannya dalam bidang agama dan social budaya. Pengakuan Pemerintah Bali terhadap keberadaan desa adat atau desa pakraman terbukti

dengan adanya Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 Jo. Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman.

Awig-Awig desa Adat atau Pakraman menurut Perda Propinsi Bali tersebut dalam bentuk tertulis, di mana awig-awig ini tidak boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun hak asasi manusia.

Lembaga adat yang diberi tugas dan melaksanakan awig-awig adalah Prajuru Desa Adat atau Prajuru Desa Pakraman, yang bertugas menyelesaikan pelanggaran adat maupun sengketa di wilayah desa adat atau desa pakraman masing-masing. Di samping itu lembaga adat pada masyarakat desa adat atau desa pakraman di tingkat Kecamatan yang disebut majelis desa, di tingkat Kabupaten/Kota disebut majelis madya dan di tingkat Propinsi disebut majelis utama. Majelis desa dipilih dari utusan desa pakraman sekecamatan, majelis madya dipilih dari dan oleh utusan desa pakraman sekabupaten/kota, dan majelis utama dipilih dari dan oleh utusan desa pakraman se Bali. Majelis desa menyelesaikan sengketa adat atau pelanggaran adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa adat atau desa pakraman. Lembaga adat yang diberi tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam upacara adat atau upacara keagamaan adalah Pecalang.

## **A. Kesimpulan**

1. Jenis-jenis perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam pelanggaran adat menurut adat Bali adalah pencurian benda-benda suci, pembunuhan dan penganiayaan di tempat suci atau pura, pengrusakan tempat suci, pelanggaran kesusilaan di

pura, lokiaka sanggraha, smandel sanggrama, gamia gemana, salah karma, drati karma, melarikan istri orang, wakpurusia, pembongkaran kuburan, menguburkan mayat dan membakar simbol orang meninggal di pekarangan rumah, menguburkan mayat/jenasah pada hari raya, memasuki pura pada saat kesebalan krena kematian atau wanita sedang datang bulan, mengembala binatang piaraan di pekarangan pura, pematang sawah yang berisi tanaman dan perkebunan warga, mengeluarkan kata kotor di pura serta melakukan sumpah cor tanpa ijin prajuru desa.

2. Pelaksanaan penyelesaian pelanggaran adat di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng menurut hukum adat Bali adalah pelanggaran adat yang tidak merupakan tindakan kriminal yang diatur dalam KUHP diselesaikan pertamanya di tingkat Prajuru Banjar Adat, dan apabila tidak berhasil diselesaikan maka dilanjutkan penyelesaiannya melalui paruman warga banjar adat dan jika hal ini juga tidak berhasil diteruskan ke Prajuru Desa Adat Sepang dan jika hal ini juga tidak berhasil akan diserahkan kepada pemerintah guna memperoleh keputusan. Namun selama ini segala pelanggaran adat yang terjadi di Banjar Adat diselesaikan secara baik di tingkat Prajuru Banjar Adat.

## **B. Saran**

Penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat di Bali sebaiknya melalui lembaga yang ada di dalam masyarakat terlebih dahulu seperti Prajuru Desa Adat atau Prajuru Desa Pakraman, karena bila terjadi pelanggaran adat maka

penyelesaiannya sangat sederhana dan lebih memberikan rasa keadilan kepada warga masyarakat, karena warga sendiri ikut berperan serta dalam proses penyelesaian tersebut. Apabila pihak yang terkena/pelaku pelanggaran adat tidak puas dengan penyelesaian Prajuru Desa Adat maka yang bersangkutan dapat meneruskan masalahnya kepada pemerintah.

---